

BAB II

PEMUDA MUHAMMADIYAH: SETTING PENELITIAN

2.1. Sejarah Madrasah Anti Korupsi

Madrasah Anti Korupsi adalah salah satu program unggulan PP Pemuda Muhammadiyah hasil kongkret dari Gerakan Berjamaah Lawan Korupsi yang digagas oleh ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, sebagai tafsir dan nalar baru gerakan pemuda muhammadiyah. Berangkat dari kesadaran bahwa korupsi harus dilawan dengan membangun budaya antikorupsi dikalangan pemuda, budaya dimana koruptor adalah manusia yang paling hina dan dibenci. Gerakan berjamaah lawan korupsi merupakan antitesis dari perilaku korupsi berjamaah yang terjadi belakangan ini, hal tersebut merujuk dari banyaknya tersangka korupsi yang melibatkan keluarga dan kolega dalam melakukan perbuatan korupsi.

Pemuda Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi pemuda yang sangat peduli terhadap masalah korupsi dan *issue* antikorupsi. Gerakan yang dilakukan oleh Pemuda Muhammadiyah ini dilakukan sebagai upaya perlawanan terhadap korupsi dengan memutuskan mata rantai korupsi dikalangan pemuda. Fakta tentang korupsi di Indonesia mendorong PP Pemuda Muhammadiyah bekerjasama dengan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) untuk bersama-sama (berjamaah) dalam menciptakan kondisi indonesia yang lebih baik lagi, yaitu indonesia dimana hak publik harus diterima sepenuhnya bebas dari korupsi.

Menciptakan Indonesia dimana nilai-nilai kejujuran dan antikorupsi menjadi mental utama bangsa. Pemuda Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah amar maruf nahi munkar, bermaksud untuk mangajak kepada kebaikan dan melawan kemungkaran. Tujuan madrasah antikorupsi yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas aktivis pemuda muhammadiyah dalam agenda antikorupsi dalam rangka meningkatkan peran kebangsaan kader pemuda muhammadiyah.

Madrasah Antikorupsi dilaunching oleh pemuda muhammadiyah dalam kegiatan deklarasi Berjamaah Lawan Korupsi pada tanggal 8 Februari 2015, dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto, Koordinator ICW Ade Irawan, dan para aktivis pegiat antikorupsi lainnya. Menurut Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak gerakan antikorupsi harus menjadi gerakan kebudayaan. Jika korupsi dianggap sebagai budaya, maka cara untuk melawan korupsi adalah dengan membuat budaya baru, yaitu budaya antikorupsi. Hanya perlawanan melalui kebudayaan yang dapat melawan praktik korupsi secara masif, melalui gerakan pendidikan diharapkan dapat mendorong perubahan sikap dan tindakan. Madrasah Antikorupsi nantinya akan dilaksanakan dengan melibatkan jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan perguruan tinggi negeri lainnya. Madrasah Antikorupsi ini diharapkan akan menjadi tempat menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi yang selanjutnya akan dipraktikkan dalam kehidupan keseharian. Sehingga masyarakat dapat membentengi diri dari praktek korupsi.

2.2. Tujuan Madrasah Antikorupsi

A. Umum

Meningkatnya kesadaran dan kapasitas aktivis Pemuda Muhammadiyah dalam agenda antikorupsi dalam rangka meningkatkan peran kebangsaan kader Pemuda Muhammadiyah.

B. Khusus

1. Meningkatkan komitmen Pimpinan Pemuda Muhammadiyah mulai dari tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Ranting dalam pemberdayaan dan peran serta masyarakat sipil dalam agenda kebangsaan.
2. Meningkatkan jumlah Mubaligh Pemuda Muhammadiyah yang terlatih sebagai kader antikorupsi
3. Meningkatkan kesadaran moral aktifis Pemuda Muhammadiyah sebagai pelopor, pelangsunng dan penyempurna Gerakan Dakwah Muhammadiyah di daerah binaan.
4. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis kader Pemuda Muhammadiyah dalam agenda pemberantasan korupsi di daerah binaan.

2.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari kegiatan lebih menitik beratkan pada meningkatkan kesadaran dan kapasitas aktifis Pemuda Muhammadiyah dalam agenda bersama antikorupsi untuk meningkatkan peran kebangsaan Pemuda Muhammadiyah di

tingkat Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting serta warga dan simpatisan Muhammadiyah.

Kegiatan ini meliputi koordinasi tim pelaksana, pertemuan koordinasi tingkat Pusat dan Wilayah, Penyusunan dan produksi Media, pertemuan koordinasi tingkat kabupaten, Orientasi bagi kader di kabupaten/ kota berbasis Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Implementasi (agenda aksi), Monitoring dan Evaluasi, Penyusunan dan Penggandaan Laporan.

2.4. Lokasi Penelitian

Lokasi kelas madrasah antikorupsi dapat diadakan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), Sekolah Muhammadiyah dan amal usaha lainnya yang memungkinkan kegiatan perkuliahan diadakan.

2.5. Indikator Output

1. Terjalinnnya kerjasama program dengan lembaga-lembaga civil society lainnya yang fokus pada agenda-agenda pemberantasan korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia Corruption Watch (ICW), Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), Lembaga Swadaya Masyarakat, Media dan lain-lain.
2. Terlatihnya kader Pemuda Muhammadiyah menjadi kader penggerak antikorupsi. Tiap kelas maksimal berjumlah 30 orang selama satu semester.
3. Terdistribusinya Modul/Buku Panduan Madrasah Antikorupsi ke seluruh jejaring Pemuda Muhammadiyah hingga tingkat Kabupaten/Kota.

4. Hadirnya produk-produk kampanye dakwah antikorupsi Pemuda Muhammadiyah, seperti film pendek, musik, website, sosial media, poster, kaos, buku dan lain-lain.

2.6. Pengelolaan Organisasi

Madrasah Antikorupsi di tingkat pusat dikelola oleh kader PP Pemuda Muhammadiyah dengan struktur 1 orang Direktur, 3 orang Wakil Direktur dan Sekretaris. Madrasah Antikorupsi di tingkat daerah dipimpin oleh 1 orang Kepala Madrasah.

Untuk di tingkat pusat susunan strukturnya sebagai berikut:

1. Ketua Dewan Penasehat: Dr. M. Busyro Muqoddas
2. Ketua Dewan Pengawas: Bambang Widjojanto
3. Ketua Dewan Pengurus: Dahnil Anzar Simanjuntak
4. Sekretaris Dewan Pengurus: Abdul Rahman Syahputra
5. Direktur: Virgo Sulianto Gohardi
6. Wakil Direktur: Abrar Aziz
7. Wakil Direktur: Ahmad Fanani
8. Wakil Direktur: Gufroni
9. Sekretaris Direktur: Fuji Abdulrohman
10. Media Center: Andhik Setiawan

2.7. Lawan Korupsi Adalah *Fardhu 'Ain*

"Koruptor alias maling juga manusia. Maka mereka harus diperlakukan dengan manusiawi pula". Begitu pesan politikuscum "manusia bijak". Apakah

mereka sempat berpikir kemanusiaan ketika mengambil hak-hak publik?. Apakah anggota keluarga mereka sempat berpikir dari mana asal usul uang yang selama ini mereka nikmati?. Tidak sama sekali. Kemewahan yang tidak halal menutupi mata dan hati mereka. Ketika tertangkap, laku tidak bersalah jamak ditunjukkan, bahkan berusaha merebut hati publik dengan berbagai cara. Ada yang melakukan tuduhan balik, seolah didzalimi, ada yang menggelar do'a bersama mengharap dukungan dari publik, dengan menyatakan “bahwa tertangkapnya anggota keluarga mereka adalah musibah dan cobaan dari Allah Swt.”, dan media serta pihak-pihak yang ikut mengungkap dugaan tindak pencurian uang rakyat yang mereka lakukan sebagai pihak yang tendensius, punya kepentingan politik untuk merebut kekuasaan. Deretan sulap kata pledoi untuk menarik simpati publik dilakukan terduga koruptor.

Perlawanan terhadap korupsi tidak boleh kendor hanya karena pledoi “memelas” para terduga koruptor. Publik harus terus ikut memberikan sanksi sosial yang seolah tiada ampun, memberikan hukuman sosial seberat- beratnya. Era keterbukaan media, memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan hukuman tiada ampun melalui media sosial baik dalam bentuk blog, micro blog, serta media-media lainnya seperti koran dan televisi. Hukuman sosial yang diperoleh dari publik tersebut akan melengkapi hukuman yang diperoleh oleh para maling tersebut ketika hukuman diputuskan oleh pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR).

Gerakan-gerakan anti korupsi harus terus di duplikasi secara massif, semua elemen masyarakat sipil harus menjadi bagian dari gerakan antikorupsi,

semua orang harus siap menjadi penggiat anti korupsi. Duplikasi gerakan antikorupsi penting, karena sesungguhnya, akar keterlambatan pembangunan Indonesia adalah korupsi, bukan yang lain.

Korupsi telah membuat perencanaan ekonomi yang kita buat tidak bisa berjalan dengan baik, selalu dihadapkan dengan kegagalan pada tingkat proses dan hasil. Korupsi pula yang membuat politik kita, dipenuhi dengan praktik tidak beradab, praktik politik yang abai kepentingan publik, politik yang sejatinya menjadi sarana memperbaiki peradaban justru merusak tatanan peradaban. Uang telah menjadi bagian terpenting dalam praktik politik kita, integritas dan kompetensi adalah “loak” yang terbuang. Pembangunan pendidikan kita pun, disandera oleh praktik korupsi, besarnya anggaran disektor ini bukan justru memperbaiki akses dan kualitas pendidikan kita, justru memberikan mangkuk yang lebih besar buat pestapora para maling dilingkungan pendidikan, para pendidik tidak malu lagi dengan “jubah” suci sebagai pendidik, ikut mencuri hak publik. Agamawan kita pun ceramah tentang moral dan kejujuran, tetapi dibelakang podium mereka melahap uang haram korupsi, tengok saja kasus beberapa agamawan yang terlibat kasus korupsi.

Jadi, tidak ada sudut negeri ini yang bebas dari korupsi. Virus korupsi, sudah menjadi epidemic, yang merusak semua sendi-sendi peradaban kita. Sehingga, adalah kesia-siaan bicara tentang perbaikan ekonomi, politik, pendidikan, teknologi dan sebagainya, tanpa terlebih dahulu menuntaskan deretan permasalahan korupsi di negeri ini. Maka adalah fardhu 'ain bagi seluruh anak negeri ini untuk melawan dan ikut memberikan sanksi sosial bagi para koruptor.

Tentu juga dengan memulai hidup “bersih” tanpa korupsi dimulai dari diri dan rumah kita.

Berangkat dari fakta tersebut, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mendorong gerakan “Berjamaah Lawan Korupsi” yang saat ini sudah menjadi “trendsetter” bagi gerakan perlawanan korupsi di Indonesia khususnya yang diinisiasi oleh Gerakan Kepemudaan Islam Indonesia, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah melalui gerakan berjamaah lawan korupsi telah menginisiasi berdirinya, “Madrasah Antikorupsi” yang saat ini sudah mulai beroperasi di Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) dan juga segera berdiri di Universitas Muhammadiyah Gresik dan Bangka Belitung, Insyaa Allah juga akan berdiri Madrasah Antikorupsi di 20 Kota/Kabupaten lainnya, sebagai bentuk gerakan nyata Pemuda Muhammadiyah mendorong gerakan perlawanan terhadap korupsi dan menghadirkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejatinya, Islam mengajarkan Akhlak/Moral Jujur sebagai variabel utama menjalankan perintah Agama.